

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang sangat penting untuk membentuk Sumber Daya Manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju.

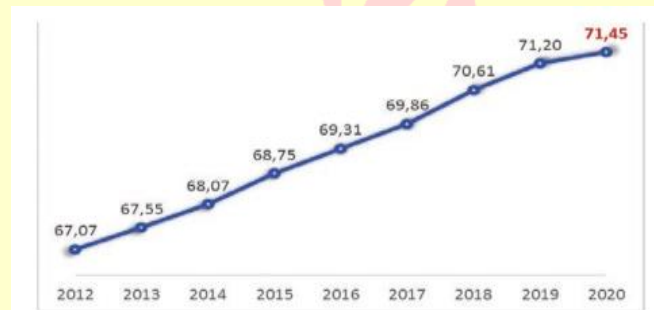
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kemudian ditegaskan kembali dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan pada ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Dengan adanya landasan konstitusional ini, pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap bidang pendidikan melalui kebijakan dan program yang dikeluarkannya, salah satunya adalah program wajib belajar.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1 menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Dalam pelaksanaan UU ini, kemudian dikeluarkan program Wajib Belajar 9 Tahun melalui Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Seiring perkembangan waktu, pemerintah kembali mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun. Program wajib Belajar 12 Tahun ini biasa disebut dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang menggunakan payung hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Program ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan, dari program Wajib Belajar 9 tahun kemudian dilanjutkan dengan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Hadirnya program Wajib Belajar 12 Tahun ini diharapkan semua anak bangsa di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan akan terpenuhi secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2012 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2020

(Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara)

Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan komponen-komponen penilaian IPM. Diantara komponen penilaian IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2020

(Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara)

Berdasarkan diagram di atas, HLS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terlihat HLS berada pada angka 13,65 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Sulawesi Tenggara memiliki harapan sekolah hingga tamat jenjang pendidikan D1. Sementara itu, untuk RLS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terlihat RLS berada pada angka 9,04 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Tenggara rata-rata pendidikannya adalah tamat SMP sederajat. Pertumbuhan yang positif ini, baik itu dari angka HLS maupun RLS merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara semakin sadar akan pentingnya pendidikan.

Sekalipun IPM Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan selama periode 2012 hingga 2020, tetapi secara nasional IPM Sulawesi Tenggara masih berada di urutan ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya melalui program pendidikan harus terus ditingkatkan agar bisa sejajar dengan kualitas sumber daya manusia di provinsi lainnya yang lebih maju.

Perkembangan kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	APK	APM
1	SD/ Sederajat	107,97	97,70
2	SMP/ Sederajat	87,10	77,64
3	SMA/ Sederajat	87,74	63,41

(Sumber BPS Provinsi Sulawesi Tenggara)

Berdasarkan tabel di atas, Nilai APK pada jenjang SD melebihi 100, artinya masih terdapat siswa SD di Sulawesi Tenggara yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid yang bersekolah SD lebih

banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 tahun. Nilai APK SMP dan SMA masih di bawah 100, artinya masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di SMP dan SMA pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Sementara itu untuk nilai APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum menyentuh angka 100. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Melihat perkembangan sumber daya manusia dan kondisi pendidikan di Sulawesi Tenggara dari data-data di atas, maka perlu dilakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan dari implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun secara nasional, tentu tidak terlepas dari keberhasilan implementasi program tersebut di setiap daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul penelitian “Evaluasi Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi *context* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara, ditinjau dari dasar hukum, tujuan dan sasaran program.
2. Mengevaluasi *input* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara, ditinjau dari perencanaan, sumber daya manusia pelaksana program, sarana dan prasarana, dan pembiayaan program.
3. Mengevaluasi *process* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring program.

4. Mengevaluasi *product* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana *context* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari dasar hukum, tujuan dan sasaran program?
2. Bagaimana *input* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari perencanaan, sumber daya manusia pelaksana program, sarana dan prasarana, dan pembiayaan program?
3. Bagaimana *process* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring program?
4. Bagaimana *product* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui *context* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari dasar hukum, tujuan dan sasaran program.
2. Untuk mengetahui *input* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari perencanaan, sumber daya manusia pelaksana program, sarana dan prasarana, dan pembiayaan program.
3. Untuk mengetahui *process* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring program.

4. Untuk mengetahui *product* implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah.

1.6 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan memperkaya khasanah keilmuan bagi dunia pendidikan khususnya Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai saran bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun.
2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan pasca sarjana.

1.7 State of The Art

State of the art pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lainnya, yaitu penelitian dengan menggunakan konsep yang identik atau hampir sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Kemudian peneliti dapat melihat sejauh mana penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan evaluasi implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.

Tabel 1.2 Penelitian Terkait Program Wajib Belajar 12 Tahun

No.	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Program

	<p>Yogyakarta, Yenny Merinatul Hasanah & Cepi Safruddin Abdul Jabar, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5 Nomor 2, September 2017.</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif dengan model evaluasi yang digunakan adalah <i>Discrepancy Evaluation Model (DEM)</i>.</p>	<p>Wajib Belajar 12 Tahun: (a) kecukupan tenaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, (b) ketersediaan sarana prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan, dan (c) ketersediaan pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. (2) pencapaian tujuan program wajib belajar 12 tahun: (a) meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), (b) mengurangi Angka Putus Sekolah (APS), (c) meningkatkan Angka Melanjutkan (AM), (d) program wajib belajar sudah dapat meningkatkan anak lulus minimal SMA/SMK dan sederajat, dan (e) terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua. (3) Hambatan-hambatan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah: (a) rendahnya daya beli/tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, (b) rendahnya minat anak dan kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, (c) masih adanya anak putus sekolah di Kota Yogyakarta (d) sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kurang maksimal, dan (e) tidak tepatnya subsidi (KMS) pemerintah Kota Yogyakarta.</p>
2	<p>Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya, Ikhyia Ulumudin & Sri Fajar Martono, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16 Nomor 2, April 2017.</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa strategi pertama yang dilakukan kota Surabaya dalam mendukung wajib belajar 12 tahun adalah menyiapkan dukungan regulasi melalui peraturan daerah (termasuk walikota) yang mengamanatkan tentang pembiayaan pendidikan. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi siswa, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Satu-satunya sumber dana biaya operasional sekolah untuk sekolah</p>

		menengah negeri di Surabaya adalah hibah BOS dari pemerintah pusat dan hibah BOPDA dari pemerintah daerah, sedangkan untuk sekolah swasta, juga ada dukungan dari masyarakat dalam bentuk kontribusi komite. Program wajib belajar 12 tahun di Surabaya dapat diadopsi sebagai praktik terbaik bagi kabupaten/kota lain yang melaksanakan program tersebut.
3	<p>The Implementation of 12-Year Compulsory Education on Departement of Education in North District Barito, Indonesia, Irda Muslimin, Jamaluddin, Budi Suryadi, European Journal of Social Sciences Studies, Volume 4 Nomor 5, Tahun 2019.</p> <p>Metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Research result; 1) implementation of compulsory education policy 12 years in North Barito regency consists of three main elements, namely: a) implementing policies; b) the program c) target groups. 2) implementation constraints compulsory 12 years in North Barito Regency, namely: (a) lack of budget; (b) zoning (c) lack of understanding of parents on education and lack of interest for school children; (d) the weak economy; (e) infrastructure is lacking; (f) the lack of teachers in remote areas; 3) the efforts made in the implementation of compulsory education to 12 years: (a) the Department of Education to prioritize the more important and urgent; (b) the school received in accordance with the capacity of the class and the students must sign up outside the zone (c) provide insight to the public about the importance of education; (d) to disseminate to the public to participate free of charge and provides scholarships for disadvantaged children; (e) proposals procurement of facilities and infrastructure.</p>
4	<p>12-Years Cumpolsory Education Policy and Education Participation Completeness (Evidence from Indonesia), Cep Kiki Kusumah, The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning Volume 2 Nomor 2, Agustus 2021.</p>	<p>Indonesia is facing a problem with education outcomes, both in access and quality. To increase education access and participation, the President of Indonesia committed to implementing a 12-years compulsory education policy. As a</p>

Metode Penelitian Kuantitatif.	<p>result, upper secondary education's completion rate has increased significantly in districts that implement 12-years compulsory education rather than in districts that did not implement it. Strategies attached to the policy also considerably affect the completion rate, except for providing community learning centers. However, in every model, the implementation of 12-years compulsory education always significantly affects upper secondary education's completion rate. The district government that implemented 12-years compulsory education has achieved this condition because of the innovative effort to reach this target.</p>
--------------------------------	--

